



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan. Gedongkuning Nomor. 146 Yogyakarta 55171
Telepon (0274) 378431, Faksimili (0274) 378432
Laman: jogja.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwiljogja@kemenkum.go.id

Nomor : W14.PW.03.04-4096
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : **Laporan Penyelenggaraan SPIP**
Triwulan II Tahun 2025

23 Juni 2025

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
- di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Kemajuan Penyelenggaraan SPIP

Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP sampai dengan triwulan II Tahun 2025 mencapai 49,23% dari target pada tahun 2025. Capaian ini disebabkan :

a. Hal positif yang mendukung pencapaian tersebut adalah

➤ Pada tahap persiapan yang meliputi kegiatan pemahaman (*knowing*), diantaranya :

1. Disusun tim penyelenggara SPIP dan dituangkan dalam SK Kepala Kantor Wilayah Nomor W.14-465.PW.02.03 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta serta rencana kerja yang diawali dengan rapat penyusunan tim;
2. Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;

➤ Pada tahap penyusunan Rencana Penyelenggaraan telah dilaksanakan Rapat mitigasi risiko Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko oleh Tim penyusun dan UPR pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Januari 2025.

Hasil yang dicapai

Adanya pemahaman yang sama dalam menyusun dokumen manajemen risiko Kantor Wilayah dengan berpedoman pada Permenkum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum. Dalam penetapan tujuan didasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, serta memperhatikan isu penting saat ini.

Dokumen MR yang disusun memperhatikan terkait penegakan nilai integritas, pencegahan pungli dan gratifikasi dalam pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa dan proses rekrutmen pegawai. Risiko terkait kebakaran dan bencana alam juga masuk dalam daftar risiko yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

- Pada tahap pelaksanaan, Kantor Wilayah Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan mitigasi resiko pada masing-masing proses bisnis dan pelaksanaan tugas dan dituangkan dalam matriks manajemen risiko. Adanya identifikasi tersebut, memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengendalian intern karena telah disusun analisis, evaluasi, penanganan serta pemantauan risiko.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyelenggaraan pengendalian dikaitkan dengan unsur-unsur yang ada dalam SPIP.

Hasil yang dicapai :

1. Penguatan Tata Kelola Administrasi (Unsur SPIP: Lingkungan Pengendalian)

- ✓ Dilaksanakannya **Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
- ✓ Peningkatan kapasitas SDM melalui **Pelatihan Manajemen Arsip Digital** guna mendukung efektivitas pengelolaan dokumen.

2. Optimalisasi Pelayanan Publik (Unsur SPIP: Aktivitas Pengendalian)

- ✓ Implementasi **aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelayanan Elektronik)** untuk mempercepat proses administrasi surat-menyurat dan permohonan layanan.
- ✓ Revitalisasi **helpdesk online** guna meningkatkan respon terhadap keluhan masyarakat.

3. Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat (Unsur SPIP: Komunikasi dan Informasi)

- ✓ Kegiatan "**Hukum Goes to Campus**" di UGM dan UNY, menyosialisasikan

UU ITE dan Hak Kekayaan Intelektual kepada mahasiswa.

- ✓ Webinar "**Perlindungan Hukum bagi UMKM**" bersama Dinas Koperasi DIY, diikuti 300 peserta.

4. Layanan Bantuan Hukum Gratis (Unsur SPIP: Penilaian Risiko)

- ✓ Peningkatan jumlah penerima bantuan hukum mencapai **150 orang** dengan fokus pada kelompok rentan (perempuan, disabilitas, dan anak).
- ✓ Pemantauan dan evaluasi **kualitas advokat mitra** untuk memastikan standar layanan terpenuhi.

5. 1. Harmonisasi Perda DIY (Unsur SPIP: Pemantauan)

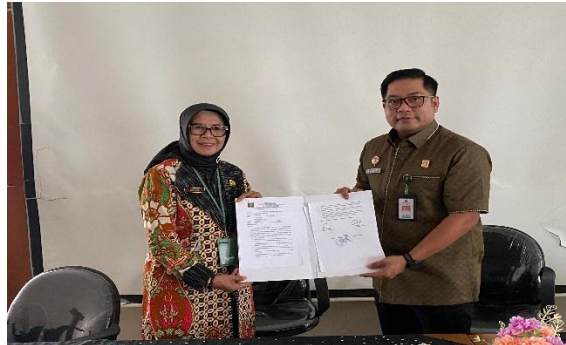
- ✓ **Kemenkum DIY Kawal Harmonisasi Raperwal Pola Karier PNS Kota Yogyakarta** (Kegiatan pengharmonisasian ini merupakan tindak lanjut atas undangan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari BKPSDM Kota Yogyakarta selaku pemrakarsa Raperwal.)



- ✓ **Kemenkum DIY Fasilitasi Penyusunan Raperda RPJMD Gunungkidul 2025-2029, Perkuat Sinergi Pembangunan Berkeadilan** (Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah dengan memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Fasilitasi ini bertujuan untuk memastikan terciptanya regulasi yang berkeadilan, inklusif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Gunungkidul).



- ✓ **Kementerian Hukum DIY Fasilitasi Penyusunan Raperbup Gunungkidul untuk Pengelolaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan** (Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY mengambil peran aktif dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Gunungkidul. Kali ini, Kemenkum DIY memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Gunungkidul tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) pada Satuan Pendidikan Kesetaraan).



- ✓ Dilakukan **uji materi terhadap 3 Perda DIY** terkait keselarasan dengan peraturan pusat.
- ✓ FGD "**Sinergi Hukum Pusat-Daerah**" bersama DPRD DIY untuk meminimalisir tumpang tindih regulasi.

6. Pembinaan Aparatur Hukum Daerah (Unsur SPIP: Pengendalian Aktivitas)

- ✓ Pelatihan "**Teknik Penyusunan Naskah Akademik**" bagi 50 ASN Pemda DIY.
 - ✓ Penyusunan **database peraturan desa** berbasis online untuk memudahkan akses dan evaluasi.
- Pada tahap pengembangan berkelanjutan, dimaksudkan untuk mendukung kemajuan penyelenggaraan SPIP, yaitu dengan dilaksanakannya rapat evaluasi pada setiap bulan, serta penyusunan Laporan Triwulan.
- b. Kendala penyelenggaraan SPIP pada Kanwil Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
1. Kurangnya pemahaman menyeluruh terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
 2. Kurangnya dukungan Satgas SPIP dalam penyelenggaraan SPIP yang dapat menjangkau seluruh unit kerja pemilik risiko;
 3. Masih terbatasnya sarana prasarana termasuk dukungan penyedia teknologi informasi untuk peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP;
 4. Terdapat kendala dan keterbatasan Kanwil serta UPT dalam pemenuhan

kriteria penilaian maturitas SPIP, diantaranya terkait dokumen, wawancara dan observasi;

2. Rencana Tindak pada Triwulan Selanjutnya

Atas capaian tersebut, rencana tindak pada Triwulan III Tahun 2025 adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/FGD/Workshop dengan narasumber dari Inspektorat Jenderal ataupun dari BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Melaksanakan rapat seluruh satgas SPIP untuk menunjang penyelenggaraan Pengendalian Internal yang dapat menjangkau seluruh unit kerja pemilik risiko;
- c. Menyusun daftar kebutuhan Sarpras dan mengajukan pada Biro Perencanaan;
- d. Melaksanakan koordinasi berkelanjutan dengan BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Inspektorat Jenderal terkait penilaian Mandiri Maturitas SPIP;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 23 Juni 2025
Kepala Kantor Wilayah,

Agung Rektono Seto

**TABEL 2. LAPORAN KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN I TAHUN 2025**

No	Tahapan	Indikator Output	Satuan	Bukti Dokumen	Volume 1 Tahun	Volume Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
A	Persiapan						
	Pemahaman	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi/ FGD/ Diseminasi tentang SPIP	Laporan	Laporan kegiatan, Notulen, dan Daftar hadir sosialisasi/ FGD/ diseminasi tentang SPIP	4	2	50%
		Jumlah laporan kegiatan diklat terkait SPIP	Laporan	Laporan Kegiatan Diklat	1	1	100%
	Pemetaan	Jumlah laporan diagnostic assessment/ survey/ kajian / peneltian tentang SPIP dan identifikasi AOI (Area Of Improvement)	Laporan	Laporan	1	0	0%
B	Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pelaksanaan	Jumlah dokumen rencana penyelenggaraan SPIP	Dokumen	Rencana Penyelenggaraan SPIP	1	1	100%
	Tingkat Entitas	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktivitas	Dokumen	Dokumen Register/ Daftar risiko dan peta resiko (tentatif)	1	1	100%
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam pembangunan infrastruktur	Kebijakan/ Prosedur/ Pedoman dll	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	1	0	50%
		Jumlah kegiatan internalisasi/ implementasi	Kegiatan	Laporan, Notulen, Materi, dan Daftar Hadir diseminasi, pelatihan, dll	4	0	0%

	Tingkat Kegiatan	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktivitas	Dokumen	Dokumen Profil Risiko dan peta risiko	1	1	100%
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam pembangunan infrastruktur	Kebijakan/ Prosedur/ Pedoman dll	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	1	0	0%
		Jumlah kegiatan internalisasi/ implementasi	Kegiatan	Laporan, Notulen, Materi, dan Daftar Hadir diseminasi, pelatihan, dll	4	2	50%
	Pengembangan Berkelanjutan	Jumlah Rapat Berkala	Notulen	Notulen, dan daftar hadir	4	2	50%
		Jmlah laporan kemajuan penyelenggaraan SPIP	Laporan	Laporan triwulan dan Laporan tahunan	5	2	40%
		Prosentase penyelesaian tindak lanjut	Prosentase tindak lanjut	Laporan inspektorat, Laporan Satgas Setempat, Berita Acara, Action Plan yang disetujui pejabat structural terkait, Bukti Tindak Lanjut	1	0	0%
					29	12	49,23%



Yogyakarta, 23 Juni 2025
Kepala Kantor Wilayah,

Agung Rektono Seto

Langkah 1: Penetapan Tujuan

Unit Pemilik Risiko: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode Penerapan: 2025

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko
1	2	3	4	5	6
Konteks MR: Standar Kinerja (Bagian Tata Usaha dan Umum)					
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1	Aplikasi internal dan media sosial rentan terhadap serangan injeksi
				2	Penyimpanan data pada server lokal belum memiliki backup
				3	Gangguan jaringan yang sering terjadi menghambat proses kinerja
				4	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Konteks MR : Risiko Fraud (Bagian Tata Usaha dan Umum)					
2	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	5	Potensi penerimaan gratifikasi dalam memberikan pelayanan
				6	Manipulasi data dan laporan dengan menyampaikan laporan fiktif atau tidak akurat
				7	Penyalahgunaan anggaran dengan penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau di luar tujuan program
Konteks MR : Risiko Keuangan (Bagian Tata Usaha dan Umum)					
3	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	8	Gagalnya Tender pengadaan Barang dan Jasa
				9	Lambatnya penyerapan anggaran dikarenakan terjadi kendala saat pengajuan SPM
				10	Terdapat BMN yang hilang
				11	Ketidakcukupan anggaran
Konteks MR : Standar Kinerja (Divisi Pelayanan Hukum)					
4	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	12	Keterlambatan pelayanan publik AHU kepada masyarakat
				13	Kualitas SDM yang tidak memadai
				14	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal
5	Penyelenggaraan kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	15	Penanganan yang kurang optimal, terkait dengan waktu yang diperlukan untuk menanggapi pengaduan masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	16	Kurang pemahaman masyarakat terkait Kekayaan Intelektual
			Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17	Ketidakmampuan memenuhi standar waktu proses
Konteks MR : Fraud (Divisi Pelayanan Hukum)					
6	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	18	Adanya pungutan liar atau biaya tambahan yang tidak resmi yang diminta dari masyarakat atau pelaku usaha
7	Penyelenggaraan kekayaan Intelektual di	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	19	Pemalsuan dokumen pendaftaran Kekayaan Intelektual
Konteks MR : Keuangan (Divisi Pelayanan Hukum)					
8	Penyelenggaraan kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	20	Kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan PNBPN yang menyebabkan ketidakakuratan laporan keuangan
		Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	21	Proses pengaduan masyarakat memerlukan biaya yang signifikan
9	Penyelenggaraan kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	22	Terdapat biaya tambahan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	23	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang KI dapat merusak reputasi Kantor Wilayah yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat dan pemilik hak KI
			Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	24	Terdapat keterlambatan proses permohonan KI sehingga pemohon kehilangan minat dan berpotensi mengurangi pendapatan dari PNBPN
Konteks MR: Standar Kinerja (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)					
10	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	25	Keterlambatan Penyelesaian Produk Hukum
11	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	26	Tidak ada mekanisme evaluasi yang jelas untuk mengukur keberhasilan program atau tindak lanjut pasca-pelatihan, seperti pendampingan atau monitoring

	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	27	Evaluasi yang dilakukan tidak mendalam atau tidak komprehensif, sehingga produk hukum yang dihasilkan mengandung kelemahan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
			Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	28	Proses fasilitasi perencanaan peraturan daerah tidak selesai tepat waktu, menyebabkan penundaan dalam penyusunan atau pengesahan peraturan daerah
12	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	29	Ketidaksesuaian layanan dengan standar yang ditetapkan oleh JDIHN
		Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	30	Keterlambatan dalam memberikan bantuan hukum litigasi kepada pemohon
			Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	31	Keterlambatan dalam memberikan bantuan hukum non litigasi kepada pemohon
		Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	32	Kualitas program peningkatan sadar hukum di desa binaan tidak memenuhi target
13	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Terwujudnya kemandirian rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	33	Kualitas pelayanan yang tidak konsisten
Konteks MR: Risiko Fraud (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)					
14	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	34	Kolusi dengan Pihak Eksternal
15	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	35	Dana yang dialokasikan untuk pelatihan digunakan tidak sesuai peruntukannya, seperti pengalihan dana untuk keperluan pribadi atau kegiatan lain
		Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	36	Adanya dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses evaluasi untuk mempermudah pengesahan produk hukum
			Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	37	Adanya dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses fasilitasi untuk mempermudah pengesahan peraturan daerah
16	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	38	Penyalahgunaan anggaran JDIHN untuk kepentingan pribadi atau kelompok
		Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	39	Pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum
			Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	40	Pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum
		Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	41	Pungutan liar atau praktik korupsi dalam pelaksanaan program
17	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Terwujudnya kemandirian rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	42	Penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas
Konteks MR: Risiko Keuangan (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)					
18	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	43	Pengelolaan Anggaran yang Tidak Efisien
19	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	44	Realisasi penggunaan dana tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui, menyebabkan penyimpangan atau defisit anggaran
		Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	45	Penggunaan dana tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui, menyebabkan penyimpangan atau defisit


 Yogyakarta, 30 Januari 2025
 Kepala Kantor Wilayah,
 Agung Rektono Seto

Langkah 2: Identifikasi Risiko

Unit Pemilik Risiko: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode Penerapan: 2025

No	Sasaran Strategis/Program/K egiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko	Pemilik Risiko	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Sumber (Internal/Eksternal)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konteks MR: Standar Kinerja (Bagian Tata Usaha dan Umum)								
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1	Aplikasi internal dan media sosial rentan terhadap serangan injeksi	Ka Kanwil	1.1	Sistem keamanan yang kurang memadai	Eksternal
						1.2	Terjadinya kelalaian pegawai pemegang akun media sosial kanwil	Internal
			2	Penyimpanan data pada server lokal belum memiliki backup	Ka Kanwil	2.1	Keterbatasan kapasitas penyimpanan server	Internal
			3	Gangguan jaringan yang sering terjadi menghambat proses kinerja	Ka Kanwil	3.1	Keterbatasan bandwidth dari pusdatin	Eksternal
			4	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)	Ka Kanwil	4.1	Jumlah SDM di bidang kehumasan tidak memadai	Internal
Konteks MR : Risiko Fraud (Bagian Tata Usaha dan Umum)								
2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	5	Potensi penerimaan gratifikasi dalam memberikan pelayanan	Ka Kanwil	5.1	Rendahnya integritas petugas pelayanan	Internal
			6	Manipulasi data dan laporan dengan menyampaikan laporan fiktif atau tidak akurat	Ka Kanwil	6.1	Kurangnya verifikasi dan validasi data	Internal
			7	Penyalahgunaan anggaran dengan penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau di luar tujuan program	Ka Kanwil	7.1	Kurangnya pengawasan dalam penyerapan anggaran	Internal
7.2	Pengelolaan anggaran yang tidak transparan	Internal						
Konteks MR : Risiko Keuangan (Bagian Tata Usaha dan Umum)								
3	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	8	Gagalnya Tender pengadaan Barang dan Jasa	Kabag TU Umum	8.1	Kualifikasi penyedia tidak memenuhi syarat dan Calon Penyedia tidak hadir dalam undangan Klarifikasi administrasi dan Teknis	Eksternal
			9	Lambatnya penyerapan anggaran dikarenakan terjadi kendala saat pengajuan SPM	Kabag TU Umum	9.1	Kendala pengajuan SPM anatara lain human eror, indikasi fraud, dan lamanya data dukung dari pihak pengelola dan pihak ketiga	Internal
			10	Terdapat BMN yang hilang	Kabag TU Umum	10.1	Petugas lalai mencatat BMN yang dikuasai pegawai, atau salah input data.	Internal
			11	Ketidakcukupan anggaran	Ka Kanwil	11.1	Perencanaan anggaran yang tidak realistis atau tidak sesuai dengan kebutuhan program	Internal

						11.2	Perubahan kebijakan atau prioritas yang memengaruhi alokasi anggaran	Internal
--	--	--	--	--	--	------	--	----------

Konteks MR : Risiko Standar Kinerja (Divisi Pelayanan Hukum)								
4	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	12	Keterlambatan pelayanan publik AHU kepada masyarakat	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	12.1	Keterbatasan SDM atau infrastruktur pendukung	Internal
6	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	13	Kualitas SDM yang tidak memadai	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	13.1	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait kriteria Kekayaan Intelektual	Internal
			14	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	14.1	Efisiensi anggaran yang harus menerapkan sistem WFH/WFO	Internal
			15	Penanganan yang kurang optimal, terkait dengan waktu yang diperlukan untuk menanggapi pengaduan masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	15.1	Penyelesaian laporan pengaduan terkait notaris yang tidak tuntas atau tidak memenuhi standar prosedur yang berlaku.	Internal
7	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	16	Kurang pemahaman masyarakat terkait Kekayaan Intelektual	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	16.1	Informasi Kekayaan Intelektual belum menjangkau tempat/wilayah yang berpotensi menghasilkan produk Kekayaan Intelektual	Eksternal
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17	Ketidakmampuan memenuhi standar waktu proses	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	17.1	Standar waktu proses yang telah ditetapkan (seperti waktu pemeriksaan substantif atau penerbitan sertifikat) mungkin tidak dapat dipenuhi karena lonjakan permohonan	Internal
Konteks MR : Risiko Fraud (Divisi Pelayanan Hukum)								
8	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	18	Adanya pungutan liar atau biaya tambahan yang tidak resmi yang diminta dari masyarakat atau pelaku usaha	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	18.1	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur mekanisme dan prosedur terkait layanan AHU	Eksternal
		#REF!	19	Pemalsuan dokumen pendaftaran Kekayaan Intelektual	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	19.1	Kurangnya pengawasan terhadap dokumen yang diajukan	Internal
Konteks MR : Risiko Keuangan (Divisi Pelayanan Hukum)								
12	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	20	Kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan PNBPN yang menyebabkan ketidakakuratan laporan keuangan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	20.1	Kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan	Internal
13	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	21	Proses pengaduan masyarakat memerlukan biaya yang signifikan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	21.1	Kurangnya alokasi anggaran khusus untuk penanganan pengaduan	Internal

14	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	22	Terdapat biaya tambahan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	22.1	Tingginya angka pelanggaran Kekayaan Intelektual yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat	Eksternal
15	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	23	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang KI dapat merusak reputasi Kantor Wilayah yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat dan pemilik hak KI	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	23.1	Penanganan kasus pelanggaran KI yang tidak efektif	Internal
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	24	Terdapat keterlambatan proses permohonan KI sehingga pemohon kehilangan minat dan berpotensi mengurangi pendapatan dari PNPB	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	24.1	Kapasitas staf dan sistem yang tidak mencukupi untuk menangani peningkatan permohonan	Internal
Konteks MR : Standar Kinerja (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)								
16	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	25	Keterlambatan Penyelesaian Produk Hukum	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	25.1	Risiko keterlambatan dalam penyusunan, review, atau pengesahan rancangan produk hukum di daerah karena beban kerja yang tinggi, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, atau koordinasi yang kurang efektif antara Kanwil dan pemerintah daerah	Internal
17	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	26	Tidak ada mekanisme evaluasi yang jelas untuk mengukur keberhasilan program atau tindak lanjut pasca-pelatihan, seperti pendampingan atau monitoring	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	26.1	Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk pelaksanaan dan evaluasi program	Internal
18	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	27	Evaluasi yang dilakukan tidak mendalam atau tidak komprehensif, sehingga produk hukum yang dihasilkan mengandung kelemahan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	27.1	Beban kerja yang tinggi atau antrean produk hukum yang harus dievaluasi.	Internal
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	28	Proses fasilitasi perencanaan peraturan daerah tidak selesai tepat waktu, menyebabkan penundaan dalam penyusunan atau pengesahan peraturan daerah	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	28.1	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam memberikan fasilitasi perencanaan peraturan daerah	Internal
19	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	29	Ketidaksesuaian layanan dengan standar yang ditetapkan oleh JDIHN	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	29.1	Kurangnya tenaga ahli atau staf yang kompeten dalam pengelolaan sistem informasi hukum	Internal
20	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	30	Keterlambatan dalam memberikan bantuan hukum litigasi kepada pemohon	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	30.1	Permohonan bantuan hukum litigasi yang melebihi kapasitas layanan	Internal

		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	31	Keterlambatan dalam memberikan bantuan hukum non litigasi kepada pemohon	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	31.1	Permohonan bantuan hukum non litigasi yang melebihi kapasitas layanan	Internal
21	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	32	Kualitas program peningkatan sadar hukum di desa binaan tidak memenuhi target	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	32.1	Kurangnya koordinasi antara Kanwil Kemenkum dengan pemerintahan daerah atau des	Internal
22	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	33	Kualitas pelayanan yang tidak konsisten	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	33.1	Kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi petugas pelayanan	Internal
Konteks MR : Risiko Fraud (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)								
23	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	34	Kolusi dengan Pihak Eksternal	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	34.1	Risiko kolusi antara pejabat Kanwil dengan pihak eksternal (pemerintah daerah) untuk menguntungkan kepentingan tertentu dalam proses penyusunan produk hukum.	Eksternal
24	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	35	Dana yang dialokasikan untuk pelatihan digunakan tidak sesuai peruntukannya, seperti pengalihan dana untuk keperluan pribadi atau kegiatan lain	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	35.1	Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.	Internal

25	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	36	Adanya dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses evaluasi untuk mempermudah pengesahan produk hukum	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	36.1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	Internal
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	37	Adanya dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses fasilitasi untuk mempermudah pengesahan peraturan daerah	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	37.1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	Internal
26	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	38	Penyalahgunaan anggaran JDIHN untuk kepentingan pribadi atau kelompok	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	38.1	Kurangnya sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan anggaran	Internal
27	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	39	Pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	39.1	Belum berjalannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	Internal
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	40	Pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	40.1	Belum berjalannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	Internal
28	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	41	Pungutan liar atau praktik korupsi dalam pelaksanaan program	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	41.1	Tidak adanya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	Internal
29	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	42	Penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	42.1	Lemahnya sistem pengawasan internal	Internal
Konteks MR : Risiko Keuangan (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)								
30	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	43	Pengelolaan Anggaran yang Tidak Efisien	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	43.1	Risiko pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien dalam kegiatan fasilitasi rancangan produk hukum, seperti pemborosan atau alokasi dana yang tidak tepat sasaran.	Internal

31	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	44	Realisasi penggunaan dana tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui, menyebabkan penyimpangan atau defisit anggaran	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	44.1	Kurangnya kapasitas staf dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran	Internal
32	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	45	Penggunaan dana tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui, menyebabkan penyimpangan atau defisit	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	45.1	Proses administrasi keuangan yang rumit dan lambat.	Internal

Yogyakarta, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah,

Agung Rektono Seto

Langkah 3: Analisis Risiko

Unit Pemilik Risiko:

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Y

Periode Penerapan:

2025

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Key Risk Indikator (KRI) / Indikator Risiko Utama	Toleransi Risiko	Kemungkinan terjadinya risiko		Dampak risiko		Tingkat Risiko	Profil Risiko
				Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Konteks MR: Standar Kinerja (Bagian Tata Usaha dan Umum)									
1.1	Sistem keamanan yang kurang memadai	Jumlah kejadian upaya peretasan aplikasi, media sosial	4	Moderat	3	Kementerian	3	9	Risiko Rendah
1.2	Terjadinya kelainan pegawai pemegang akun media sosial kanwil	Jumlah kejadian upaya peretasan aplikasi, media sosial	4	Moderat	3	Kementerian	3	9	Risiko Rendah
2.1	Keterbatasan kapasitas penyimpanan server	Jumlah penyimpanan data pada server lokal yang tidak terbackup	6	Tinggi	4	UKE I	2	8	Risiko Rendah
3.1	Keterbatasan bandwidth dari pusdatin	Jumlah gangguan jaringan yang sering terjadi	6	Tinggi	4	Kementerian	3	12	Risiko Sedang
4.1	Jumlah SDM di bidang kehumasan tidak memadai	Jumlah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)	2	Rendah	2	Kementerian	3	6	Risiko Rendah
Konteks MR: Risiko Fraud (Bagian Tata Usaha dan Umum)									
5.1	Rendahnya integritas petugas pelayanan	Jumlah penerimaan gratifikasi dalam memberikan pelayanan	4	Moderat	3	Masyarakat Umum	5	15	Risiko Sedang
6.1	Kurangnya verifikasi dan validasi data	Jumlah data dan laporan yang dilakukan manipulasi	4	Moderat	3	UKE I	2	6	Risiko Rendah
7.1	Kurangnya pengawasan dalam penyerapan anggaran	Jumlah penyalahgunaan anggaran dengan penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau di luar tujuan program	4	Moderat	3	Kementerian	3	9	Risiko Rendah
7.2	Pengelolaan anggaran yang tidak transparan	Jumlah penyalahgunaan anggaran dengan penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau di luar tujuan program	4	Moderat	3	Kementerian	3	9	Risiko Rendah
Konteks MR: Risiko Keuangan (Bagian Tata Usaha dan Umum)									
8.1	Kualifikasi penyedia tidak memenuhi syarat dan Calon Penyedia tidak hadir dalam undangan Klarifikasi administrasi dan Teknis	Jumlah Tender pengadaan Barang dan Jasa yang gagal	3	Moderat	3	UKE I	2	6	Risiko Rendah
9.1	Kendala pengajuan SPM anatara lain human eror, indikasi fraud, dan lamanya data dukung dari pihak pengelola dan pihak ketiga	Jumlah anggaran yang tidak terserap	2	Rendah	2	Kementerian	3	6	Risiko Rendah
10.1	Petugas lalai mencatat BMN yang dikuasai pegawai, atau salah input data.	Jumlah BMN yang hilang	6	Tinggi	4	Kementerian	3	12	Risiko Sedang
11.1	Perencanaan anggaran yang tidak realistis atau tidak sesuai dengan kebutuhan program	Jumlah kegiatan yang tidak terlaksana	2	Rendah	2	Kementerian	3	6	Risiko Rendah
11.2	Perubahan kebijakan atau prioritas yang memengaruhi alokasi anggaran	Jumlah kegiatan yang tidak terlaksana	2	Rendah	2	Kementerian	3	6	Risiko Rendah

Konteks MR: Standar Kinerja (Divisi Pelayanan Hukum)									
12.1	Keterbatasan SDM atau infrastruktur pendukung	Jumlah pelayanan publik AHU kepada masyarakat yang terlambat	2	Rendah	2	Masyarakat Umum	5	10	Risiko Rendah

13.1	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait kriteria Kekayaan Intelektual	Jumlah masyarakat yang belum mendaftarkan produknya pada kekayaan intelektual	6	Tinggi	4	UKE I	2	8	Risiko Rendah
14.1	Efisiensi anggaran yang harus menerapkan sistem WFH/WFO	Jumlah penanganan yang kurang optimal, terkait dengan waktu yang diperlukan untuk menanggapi pengaduan masyarakat terkait layanan AHU	4	Moderat	3	Masyarakat Umum	5	15	Risiko Sedang
15.1	Penyelesaian laporan pengaduan terkait notaris yang tidak tuntas atau tidak memenuhi standar prosedur yang berlaku.	Jumlah penanganan yang kurang optimal, terkait dengan waktu yang diperlukan untuk menanggapi pengaduan masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris	4	Moderat	3	Masyarakat Umum	5	15	Risiko Sedang
16.1	Informasi Kekayaan Intelektual belum menjangkau tempat/wilayah yang berpotensi menghasilkan produk Kekayaan Intelektual	Jumlah masyarakat yang belum mendaftarkan produknya pada kekayaan intelektual	6	Tinggi	4	UKE I	2	8	Risiko Rendah
17.1	Standar waktu proses yang telah ditetapkan (seperti waktu pemeriksaan substantif atau penerbitan sertifikat) mungkin tidak dapat dipenuhi karena lonjakan permohonan	Jumlah proses pendaftaran kekayaan intelektual yang tidak selesai sesuai standar proses	4	Moderat	3	UKE I	2	6	Risiko Rendah
Konteks MR: Risiko Fraud (Divisi Pelayanan Hukum)									
18.1	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur mekanisme dan prosedur terkait layanan AHU	Jumlah pungutan liar atau biaya tambahan yang tidak resmi yang diminta dari masyarakat atau pelaku usaha	4	Moderat	3	Masyarakat Umum	5	15	Risiko Sedang
19.1	Kurangnya pengawasan terhadap dokumen yang diajukan	Jumlah proses penyelesaian pengaduan yang dimanipulasi	4	Moderat	3	UKE I	2	6	Risiko Rendah
Konteks MR: Risiko Keuangan (Divisi Pelayanan Hukum)									
20.1	Kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan	Jumlah ketidakakuratan laporan keuangan terkait pelaporan PNPB AHU	4	Moderat	3	UKE I	2	6	Risiko Rendah
21.1	Kurangnya alokasi anggaran khusus untuk penanganan pengaduan	Jumlah kurangnya biaya yang dibutuhkan untuk proses pengaduan masyarakat	4	Moderat	3	UKE I	2	6	Risiko Rendah
22.1	Tingginya angka pelanggaran Kekayaan Intelektual yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat	Jumlah biaya tambahan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	4	Moderat	3	UKE I	2	6	Risiko Rendah
23.1	Penanganan kasus pelanggaran KI yang tidak efektif	Jumlah pelanggaran KI	6	Tinggi	4	UKE I	2	8	Risiko Rendah
24.1	Kapasitas staf dan sistem yang tidak mencukupi untuk menangani peningkatan permohonan	Jumlah proses permohonan KI yang belum diselesaikan	4	Moderat	3	UKE I	2	6	Risiko Rendah
Konteks MR: Standar Kinerja (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)									

25.1	Risiko keterlambatan dalam penyusunan, review, atau pengesahan rancangan produk hukum di daerah karena beban kerja yang tinggi, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, atau koordinasi yang kurang efektif antara Kanwil dan pemerintah daerah	Jumlah keterlambatan Penyelesaian Produk Hukum	4	Moderat	3	K/L/D Lain	4	12	Risiko Sedang
27.1	Beban kerja yang tinggi atau antrean produk hukum yang harus dievaluasi.	Jumlah produk hukum yang dihasilkan mengandung kelemahan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	2	Rendah	2	K/L/D Lain	4	8	Risiko Rendah
28.1	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam memberikan fasilitasi perencanaan peraturan daerah	Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah tidak selesai tepat waktu, menyebabkan penundaan dalam penyusunan atau pengesahan peraturan daerah	6	Tinggi	4	K/L/D Lain	4	16	Risiko Tinggi
29.1	Kurangnya tenaga ahli atau staf yang kompeten dalam pengelolaan sistem informasi hukum	Jumlah layanan dengan standar yang ditetapkan oleh JDIHN yang tidak sesuai	2	Rendah	2	Masyarakat Umum	5	10	Risiko Rendah
30.1	Permohonan bantuan hukum litigasi yang melebihi kapasitas layanan	Jumlah bantuan hukum litigasi kepada pemohon yang terlambat	4	Moderat	3	Masyarakat Umum	5	15	Risiko Sedang
31.1	Permohonan bantuan hukum non litigasi yang melebihi kapasitas layanan	Jumlah bantuan hukum non litigasi kepada pemohon yang terlambat	4	Moderat	3	Masyarakat Umum	5	15	Risiko Sedang
32.1	Kurangnya koordinasi antara Kanwil Kemenkum dengan pemerintahan daerah atau des	Jumlah program peningkatan sadar hukum di desa binaan yang tidak memenuhi target	4	Moderat	3	UKE I	2	6	Risiko Rendah

33.1	Kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi petugas pelayanan	Jumlah pelayanan yang buruk atau tidak memuaskan	4	Moderat	3	Masyarakat Umum	5	15	Risiko Sedang
Konteks MR: Risiko Fraud (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)									
34.1	Risiko kolusi antara pejabat Kanwil dengan pihak eksternal (pemerintah daerah) untuk menguntungkan kepentingan tertentu dalam proses penyusunan produk hukum.	Jumlah kolusi dengan Pihak Eksternal	2	Rendah	2	Kementerian	3	6	Risiko Rendah
35.1	Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.	Jumlah pengalihan dana untuk keperluan pribadi atau kegiatan lain	2	Rendah	2	Kementerian	3	6	Risiko Rendah
36.1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	Jumlah dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses evaluasi untuk mempermudah pengesahan produk hukum	4	Moderat	3	UKE I	2	6	Risiko Rendah
37.1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	Jumlah dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses fasilitasi untuk mempermudah pengesahan peraturan daerah	4	Moderat	3	UKE I	2	6	Risiko Rendah
38.1	Kurangnya sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan anggaran	Jumlah penyalahgunaan anggaran JDIHN untuk kepentingan pribadi atau kelompok	2	Rendah	2	Masyarakat Umum	5	10	Risiko Rendah
39.1	Belum berjalannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum	2	Rendah	2	Masyarakat Umum	5	10	Risiko Rendah
40.1	Belum berjalannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum	2	Rendah	2	Masyarakat Umum	5	10	Risiko Rendah
41.1	Tidak adanya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam pelaksanaan program	2	Rendah	2	Masyarakat Umum	5	10	Risiko Rendah
42.1	Lemahnya sistem pengawasan internal	Jumlah penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas	4	Moderat	3	UKE I	2	6	Risiko Rendah
Konteks MR: Risiko Keuangan (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)									
43.1	Risiko pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien dalam kegiatan fasilitasi rancangan produk hukum, seperti pemborosan atau alokasi dana yang tidak tepat sasaran.	Jumlah Anggaran yang Tidak Efisien	2	Rendah	2	Kementerian	3	6	Risiko Rendah
44.1	Kurangnya kapasitas staf dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran	Jumlah penyimpangan atau defisit anggaran	4	Moderat	3	UKE I	2	6	Risiko Rendah
45.1	Proses administrasi keuangan yang rumit dan lambat.	Jumlah penyimpangan atau defisit	2	Rendah	2	Kementerian	3	6	Risiko Rendah

CATATAN:

Yogyakarta, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah,
Agung Rekono Seto



Langkah 4: Evaluasi Risiko

Unit Pemilik Risiko: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode Penerapan: 2025

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1.1	Sistem keamanan yang kurang memadai	9	18	Jumlah kejadian upaya peretasan aplikasi, media sosial	4
			1.2	Terjadinya kelalain pegawai pemegang akun media sosial kanwil	9	19	Jumlah kejadian upaya peretasan aplikasi, media sosial	4
			2.1	Keterbatasan kapasitas penyimpanan server	8	22	Jumlah penyimpanan data pada server lokal yang tidak terbackup	6
			3.1	Keterbatasan bandwidth dari pusdatin	12	9	Jumlah gangguan jaringan yang sering terjadi	6
			4.1	Jumlah SDM di bidang kehumasan tidak memadai	6	27	Jumlah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)	2
			5.1	Rendahnya integritas petugas pelayanan	15	2	Jumlah penerimaan gratifikasi dalam memberikan pelayanan	4
			6.1	Kurangnya verifikasi dan validasi data	6	28	Jumlah data dan laporan yang dilakukan manipulasi	4
			7.1	Kurangnya pengawasan dalam penyerapan anggaran	9	20	Jumlah penyalahgunaan anggaran dengan penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau di luar tujuan program	4
			7.2	Pengelolaan anggaran yang tidak transparan	9	21	Jumlah penyalahgunaan anggaran dengan penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau di luar tujuan program	4
2			8.1	Kualifikasi penyedia tidak memenuhi syarat dan Calon Penyedia tidak hadir dalam undangan Klarifikasi administrasi dan Teknis	6	29	Jumlah Tender pengadaan Barang dan Jasa yang gagal	3
			9.1	Kendala pengajuan SPM anatara lain human eror, indikasi fraud, dan lamanya data dukung dari pihak	6	30	Jumlah anggaran yang tidak terserap	2

			10.1	Petugas lalai mencatat BMN yang dikuasai pegawai, atau salah input data.	12	10	Jumlah BMN yang hilang	6
			11.1	Perencanaan anggaran yang tidak realistis atau tidak sesuai dengan	6	31	Jumlah kegiatan yang tidak terlaksana	2
			11.2	Perubahan kebijakan atau prioritas yang memengaruhi alokasi anggaran	6	32	Jumlah kegiatan yang tidak terlaksana	2
	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	12.1	Keterbatasan SDM atau infrastruktur pendukung	10	12	Jumlah pelayanan publik AHU kepada masyarakat yang terlambat	2
	#REF!	#REF!	13.1	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait kriteria Kekayaan Intelektual	8	23	Jumlah masyarakat yang belum mendaftarkan produknya pada kekayaan intelektual	6
			14.1	Efisiensi anggaran yang harus menerapkan sistem WFH/WFO	15	3	Jumlah penanganan yang kurang optimal, terkait dengan waktu yang diperlukan untuk menanggapi pengaduan masyarakat terkait layanan AHU	4
			15.1	Penyelesaian laporan pengaduan terkait notaris yang tidak tuntas atau tidak memenuhi standar prosedur yang berlaku.	15	4	Jumlah penanganan yang kurang optimal, terkait dengan waktu yang diperlukan untuk menanggapi pengaduan masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris	4
			16.1	Informasi Kekayaan Intelektual belum menjangkau tempat/wilayah yang berpotensi menghasilkan produk Kekayaan Intelektual	8	24	Jumlah masyarakat yang belum mendaftarkan produknya pada kekayaan intelektual	6
	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	17.1	Standar waktu proses yang telah ditetapkan (seperti waktu pemeriksaan substantif atau penerbitan sertifikat) mungkin tidak dapat dipenuhi karena lonjakan permohonan	6	33	Jumlah proses pendaftaran kekayaan intelektual yang tidak selesai sesuai standar proses	4
	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	18.1	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur mekanisme dan prosedur terkait layanan AHU	15	5	Jumlah pungutan liar atau biaya tambahan yang tidak resmi yang diminta dari masyarakat atau pelaku usaha	4

	#REF!	#REF!	19.1	Kurangnya pengawasan terhadap dokumen yang diajukan	6	34	Jumlah proses penyelesaian pengaduan yang dimanipulasi	4
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	#REF!	20.1	Kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan	6	35	Jumlah ketidakakuratan laporan keuangan terkait pelaporan PNBP AHU	4
	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	21.1	Kurangnya alokasi anggaran khusus untuk penanganan pengaduan	6	36	Jumlah kurangnya biaya yang dibutuhkan untuk proses pengaduan masyarakat	4
	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	22.1	Tingginya angka pelanggaran Kekayaan Intelektual yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat	6	37	Jumlah biaya tambahan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	4
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	23.1	Penanganan kasus pelanggaran KI yang tidak efektif	8	25	Jumlah pelanggaran KI	6
	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	24.1	Kapasitas staf dan sistem yang tidak mencukupi untuk menangani peningkatan permohonan	6	38	Jumlah proses permohonan KI yang belum diselesaikan	4
	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	25.1	Risiko keterlambatan dalam penyusunan, review, atau pengesahan rancangan produk hukum di daerah karena beban kerja yang tinggi, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, atau koordinasi yang kurang efektif antara Kanwil dan pemerintah daerah	12	11	Jumlah keterlambatan Penyelesaian Produk Hukum	4
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	27.1	Beban kerja yang tinggi atau antrean produk hukum yang harus dievaluasi.	8	26	Jumlah produk hukum yang dihasilkan mengandung kelemahan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	2

	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	28.1	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam memberikan fasilitasi perencanaan peraturan daerah	16	1	Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah tidak selesai tepat waktu, menyebabkan penundaan dalam penyusunan atau pengesahan peraturan daerah	6
	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	29.1	Kurangnya tenaga ahli atau staf yang kompeten dalam pengelolaan sistem informasi hukum	10	13	Jumlah layanan dengan standar yang ditetapkan oleh JDIHN yang tidak sesuai	2
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	30.1	Permohonan bantuan hukum litigasi yang melebihi kapasitas layanan	15	6	Jumlah bantuan hukum litigasi kepada pemohon yang terlambat	4
	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	31.1	Permohonan bantuan hukum non litigasi yang melebihi kapasitas layanan	15	7	Jumlah bantuan hukum non litigasi kepada pemohon yang terlambat	4
	Terwujudnya pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	32.1	Kurangnya koordinasi antara Kanwil Kemenkum dengan pemerintahan daerah atau des	6	39	Jumlah program peningkatan sadar hukum di desa binaan yang tidak memenuhi target	4
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	33.1	Kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi petugas pelayanan	15	8	Jumlah pelayanan yang buruk atau tidak memuaskan	4
	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	34.1	Risiko kolusi antara pejabat Kanwil dengan pihak eksternal (pemerintah daerah) untuk menguntungkan kepentingan tertentu dalam proses penyusunan produk hukum.	6	40	Jumlah kolusi dengan Pihak Eksternal	2
	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	35.1	Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.	6	41	Jumlah pengalihan dana untuk keperluan pribadi atau kegiatan lain	2
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	36.1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	6	42	Jumlah dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses evaluasi untuk mempermudah pengesahan produk hukum	4
	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	37.1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	6	43	Jumlah dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses fasilitasi untuk mempermudah pengesahan peraturan daerah	4

	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	38.1	Kurangnya sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan anggaran	10	14	Jumlah penyalahgunaan anggaran JDIHN untuk kepentingan pribadi atau kelompok	2
		#REF!	39.1	Belum berjalannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	15	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum	2
	#REF!	#REF!	40.1	Belum berjalannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	16	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum	2
	#REF!	#REF!	41.1	Tidak adanya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	17	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam pelaksanaan program	2
		#REF!	42.1	Lemahnya sistem pengawasan internal	6	44	Jumlah penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas	4
	#REF!	#REF!	43.1	Risiko pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien dalam kegiatan fasilitasi rancangan produk hukum, seperti pemborosan atau alokasi dana yang tidak tepat sasaran.	6	45	Jumlah Anggaran yang Tidak Efisien	2
	#REF!	#REF!	44.1	Kurangnya kapasitas staf dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran	6	46	Jumlah penyimpangan atau defisit anggaran	4
			45.1	Proses administrasi keuangan yang rumit dan lambat.	6	47	Jumlah penyimpangan atau defisit	2



Yogyakarta, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah,

Agung Rektomo Seto

Langkah 5: Rencana Aksi Penanganan Risiko

Unit PemKantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode 2025

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Kode	Pengendalian Risiko (Prv/RM/Crr)	KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.1	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam memberikan fasilitasi perencanaan peraturan daerah	16	1	Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah tidak selesai tepat waktu, menyebabkan penundaan dalam penyusunan atau pengesahan peraturan daerah	5	Prv 28.1	Melakukan pelatihan teknis penyusunan peraturan daerah, analisis kebijakan, dan fasilitasi stakeholder	Jumlah Pelatihan Teknis penyusunan peraturan daerah, analisis kebijakan, dan fasilitasi stakeholder	2 dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
						RM 28.1	Melakukan evaluasi kinerja SDM dan tim untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki	Jumlah laporan evaluasi kinerja SDM setelah dilakukannya Pelatihan Teknis penyusunan peraturan daerah, analisis kebijakan, dan fasilitasi stakeholder	2 dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
						Crr 28.1	Melakukan penyederhanaan proses yang rumit untuk mengurangi beban kerja SDM dengan memanfaatkan Aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM	Pesentase keberhasilan tingkat adopsi dan pemanfaatan aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM dalam menjalankan tugas	90%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
5.1	Rendahnya integritas petugas pelayanan	15	2	Jumlah penerimaan gratifikasi dalam memberikan pelayanan	3	RM 5.1	Menetapkan sanksi yang tegas dan proporsional kepada petugas jika terbukti melanggar integritas, sesuai dengan peraturan yang berlaku	Presentase penerapan sanksi terhadap petugas yang terbukti melanggar integritas sesuai dengan peraturan yang berlaku	95%	Ka Kanwil
						Crr 5.1	Semua petugas memahami dan menandatangani komitmen terhadap kode etik dan pakta integritas	Jumlah pegawai yang telah menandatangani komitmen terhadap kode etik dan pakta integritas	1 laporan	Ka Kanwil
14.1	Efisiensi anggaran yang harus menerapkan sistem WFH/WFO	15	3	Jumlah penanganan yang kurang optimal, terkait dengan waktu yang diperlukan untuk menanggapi pengaduan masyarakat terkait layanan AHU	3	RM 14.1	Memaksimalkan layanan melalui media sosial	Presentase layanan media yang digunakan untuk memaksimalkan layanan pada masa efisiensi anggaran	1 dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
						Crr 14.1	Menggunakan fitur Live pada aplikasi Instagram dan Tiktok untuk masyarakat yang ingin bertanya secara online dan media whatsapp sebagai layanan secara elektronik	Jumlah pelayanan online dan frekuensi live setiap sesi	12 Laporan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
15.1	Penyelesaian laporan pengaduan terkait notaris yang tidak tuntas atau tidak memenuhi standar prosedur yang berlaku.	15	4	Jumlah penanganan yang kurang optimal, terkait dengan waktu yang diperlukan untuk menanggapi pengaduan masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris	3	RM 15.1	Memantau progres penyelesaian pengaduan secara berkala untuk memastikan tidak ada penundaan atau penyimpangan dari SOP	Jumlah pengaduan yang dipantau secara berkala dan diselesaikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)	1 Laporan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
						Crr 15.1	Monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses penanganan pengaduan notaris untuk memastikan perbaikan yang dilakukan efektif dengan memanfaatkan aplikasi SIEMON	Jumlah pengaduan yang dipantau secara berkala dan diselesaikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) melalui Aplikasi SIEMON	12 laporan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
18.1	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur mekanisme dan prosedur terkait layanan AHU	15	5	Jumlah pungutan liar atau biaya tambahan yang tidak resmi yang diminta dari masyarakat atau pelaku usaha	3	RM 18.1	Menyediakan panduan layanan di loket layanan, website, atau media sosial.	Jumlah unit layanan yang menyediakan panduan layanan secara lengkap di loket layanan/website/ atau media sosial	1 Dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
						Crr 18.1	Melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat, baik melalui seminar, workshop, atau kunjungan ke komunitas	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat melalui seminar, workshop, /kunjungan komunitas	4 Laporan / dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
30.1	Permohonan bantuan hukum litigasi yang melebihi kapasitas layanan	15	6	Jumlah bantuan hukum litigasi kepada pemohon yang terlambat	3	RM 30.1	Membentuk tim khusus untuk menangani pemberian bantuan hukum litigasi	Jumlah tim khusus yang dibentuk untuk menangani pemberian bantuan hukum litigasi	1 Tim	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
						Crr 30.1	Memperluas kolaborasi dengan lembaga lain seperti LBH atau perguruan tinggi untuk berbagi beban kasus	Jumlah perjanjian kerja sama (MoU) atau kegiatan kolaboratif yang terjalin dengan lembaga bantuan hukum (LBH) atau perguruan tinggi dalam satu tahun	4 Kegiatan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
31.1	Permohonan bantuan hukum non litigasi yang melebihi kapasitas layanan	15	7	Jumlah bantuan hukum non litigasi kepada pemohon yang terlambat	3	RM 31.1	Membentuk tim khusus untuk menangani pemberian bantuan hukum non litigasi	Jumlah tim khusus yang dibentuk untuk menangani pemberian bantuan hukum non-litigasi	1 Tim	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum

						Crr 31.1	Memperluas kolaborasi dengan lembaga lain seperti LBH atau perguruan tinggi untuk berbagi beban kasus	Jumlah perjanjian kerja sama (MoU) atau kegiatan kolaboratif yang terjalin dengan lembaga bantuan hukum (LBH) atau perguruan tinggi dalam satu tahun	4 Kegiatan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
33.1	Kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi petugas pelayanan	15	8	Jumlah pelayanan yang buruk atau tidak memuaskan	3	RM 33.1	Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi petugas pelayanan, baik secara tatap muka maupun online, untuk meningkatkan kompetensi teknis	Frekuensi penyelenggaraan pelatihan rutin bagi petugas pelayanan, baik secara tatap muka maupun online	2 Kegiatan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
						Crr 33.1	Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja petugas untuk mengidentifikasi apakah pelatihan telah berdampak positif	Persentase pelaksanaan evaluasi berkala terhadap peningkatan kinerja petugas pasca-pelatihan	90%	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
3.1	Keterbatasan bandwidth dari pusdatin	12	9	Jumlah gangguan jaringan yang sering terjadi	5	RM 3.1	Mengimplementasikan sistem manajemen bandwidth untuk memprioritaskan penggunaan	Persentase keberhasilan implementasi sistem manajemen bandwidth dalam memastikan aplikasi	95%	Ka Kanwil
						Crr 3.1	Melakukan koordinasi rutin dengan Pusdatin untuk memastikan ketersediaan dan keandalan bandwidth	Jumlah kegiatan koordinasi rutin dengan Pusdatin untuk memastikan ketersediaan dan keandalan bandwidth	1 Kegiatan	Ka Kanwil
10.1	Petugas lalai mencatat BMN yang dikuasai pegawai, atau salah input data.	12	10	Jumlah BMN yang hilang	5	RM 10.1	Menetapkan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran	Persentase penerapan sanksi disiplin terhadap kasus kelalaian atau pelanggaran yang teridentifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	90%	Kabag TU Umum
						Crr 10.1	Melakukan pengawasan dan monitoring secara real-time dengan memanfaatkan penerapan teknologi aplikasi TEBAS BMN	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengawasan dan monitoring real-time melalui aplikasi TEBAS BMN terhadap total aset yang diawasi	4 Laporan	Kabag TU Umum
25.1	Risiko keterlambatan dalam penyusunan, review, atau pengesahan rancangan produk hukum di daerah karena beban kerja yang tinggi, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, atau koordinasi yang kurang efektif antara Kanwil dan pemerintah daerah	12	11	Jumlah keterlambatan Penyelesaian Produk Hukum	3	RM 25.1	Memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah untuk memastikan rancangan produk hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Jumlah rancangan produk hukum pemerintah daerah yang telah mendapatkan pendampingan hukum dan dinyatakan sesuai dengan peraturan yang berlaku	12 Laporan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
						Crr 25.1	Memanfaatkan teknologi aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM untuk membantu proses review dan analisis dokumen hukum	Persentase tingkat adopsi teknologi MONDAY dan SAPA HUKUM dalam proses review dan analisis dokumen hukum mencapai ≥90% dari total dokumen yang direview dalam satu periode	95%	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
12.1	Keterbatasan SDM atau infrastruktur pendukung	10	12	Jumlah pelayanan publik AHU kepada masyarakat yang terlambat	1	Prv 12.1	Memberikan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan dalam satu tahun untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengendalian risiko	1 dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
29.1	Kurangnya tenaga ahli atau staf yang kompeten dalam pengelolaan sistem informasi hukum	10	13	Jumlah layanan dengan standar yang ditetapkan oleh JDIHN yang tidak sesuai	1	Prv 29.1	Menyelenggarakan pelatihan khusus untuk staf dalam pengelolaan sistem informasi hukum	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan dalam pengelolaan sistem informasi hukum	1 Laporan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
38.1	Kurangnya sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan anggaran	10	14	Jumlah penyalahgunaan anggaran JDIHN untuk kepentingan pribadi atau kelompok	1	Prv 38.1	Melakukan audit internal dan eksternal secara berkala	Jumlah audit internal dan eksternal yang dilakukan secara berkala dalam satu tahun untuk memastikan efektivitas anggaran JDIHN untuk kepentingan pribadi atau kelompok	1 Laporan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
39.1	Belum berjalannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	15	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum	1	Prv 39.1	Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada pelayanan pengaduan serta melakukan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan	Jumlah kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan yang dilaksanakan dalam satu tahun	4 laporan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
40.1	Belum berjalannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	16	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum	1	Prv 40.1	Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada pelayanan pengaduan serta melakukan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan	Jumlah kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan yang dilaksanakan dalam satu tahun	4 laporan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
41.1	Tidak adanya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	17	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam pelaksanaan program	1	Prv 41.1	Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada pelayanan pengaduan serta melakukan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan	Jumlah kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan yang dilaksanakan dalam satu tahun	4 laporan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
1.1	Sistem keamanan yang kurang memadai	9	18	Jumlah kejadian upaya peretasan aplikasi, media sosial	3	Prv 1.1	Memperbarui sistem keamanan IT, termasuk firewall dan enkripsi data	Persentase keberhasilan penggunaan sistem keamanan Firewall dan enkripsi data	90%	Ka Kanwil
1.2	Terjadinya kelalaian pegawai pemegang akun media sosial kanwil	9	19	Jumlah kejadian upaya peretasan aplikasi, media sosial	3	Prv 1.2	Menyusun SOP yang jelas untuk pengelolaan akun media sosial	Jumlah SOP untuk pengelolaan akun media sosial	1 Dokumen	Ka Kanwil
7.1	Kurangnya pengawasan dalam penyerapan anggaran	9	20	Jumlah penyalahgunaan anggaran dengan penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau di luar tujuan program	3	Prv 7.1	Mewajibkan pelaporan berkala tentang penyerapan anggaran	Jumlah pelaporan tentang penyerapan anggaran	4 Laporan	Ka Kanwil

7.2	Pengelolaan anggaran yang tidak transparan	9	21	Jumlah penyalahgunaan anggaran dengan penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau di luar tujuan program	3	Prv 7.2	Mengimplementasikan sistem terbuka untuk pengelolaan anggaran	Jumlah dokumen pengelolaan anggaran	4 Dokumen	Ka Kanwil
2.1	Keterbatasan kapasitas penyimpanan server	8	22	Jumlah penyimpanan data pada server lokal yang tidak terbackup	5	Prv 2.1	Menerapkan manajemen data yang efektif untuk mengoptimalkan penyimpanan	Jumlah penyimpanan data yang telah di backup	2 Dokumen	Ka Kanwil
13.1	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait kriteria Kekayaan Intelektual	8	23	Jumlah masyarakat yang belum mendaftarkan produknya pada kekayaan intelektual	5	Prv 13.1	Melakukan kampanye sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya Kekayaan Intelektual (KI)	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait pentingnya Kekayaan Intelektual kepada Masyarakat	4 Kegiatan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
16.1	Informasi Kekayaan Intelektual belum menjangkau tempat/wilayah yang berpotensi menghasilkan produk Kekayaan Intelektual	8	24	Jumlah masyarakat yang belum mendaftarkan produknya pada kekayaan intelektual	5	Prv 16.1	Mengadakan roadshow dan workshop di daerah-daerah potensial	Jumlah kegiatan workshop dan roadshow ke daerah yang potensial dan minim pendaftaran KI	4 Laporan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
23.1	Penanganan kasus pelanggaran KI yang tidak efektif	8	25	Jumlah pelanggaran KI	5	Prv 23.1	Memberikan pelatihan khusus untuk penanganan kasus KI	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan untuk penanganan kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual	2 Kegiatan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
27.1	Beban kerja yang tinggi atau antrean produk hukum yang harus dievaluasi.	8	26	Jumlah produk hukum yang dihasilkan mengandung kelemahan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	1	Prv 27.1	Menyeimbangkan distribusi tugas antar tim	Jumlah produk hukum yang telah dievaluasi karena ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan	1 Laporan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
4.1	Jumlah SDM di bidang kehumasan tidak memadai	6	27	Jumlah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)	1	Prv 4.1	Merekrut staf tambahan untuk bidang kehumasan	Jumlah tambahan staf di bidang kehumasan	1 Dokumen	Ka Kanwil
6.1	Kurangnya verifikasi dan validasi data	6	28	Jumlah data dan laporan yang dilakukan manipulasi	3	Prv 6.1	Mengimplementasikan sistem verifikasi dan validasi data yang ketat	Jumlah data pelaporan yang tervalidasi dan tidak terdapat unsur manipulasi	1 Dokumen	Ka Kanwil
8.1	Kualifikasi penyedia tidak memenuhi syarat dan Calon	6	29	Jumlah Tender pengadaan Barang dan Jasa yang gagal	2	Prv 8.1	Melakukan verifikasi ketat terhadap kualifikasi penyedia	Jumlah tender pengadaan barang dan jasa dari penyedia yang telah terverifikasi kualitasnya	1 Dokumen	Kabag TU Umum
9.1	Kendala pengajuan SPM antara lain human eror, indikasi fraud, dan lamanya data dukung dari pihak pengelola dan pihak ketiga	6	30	Jumlah anggaran yang tidak terserap	1	Prv 9.1	Memberikan pelatihan tentang prosedur pengajuan SPM	Jumlah pelatihan terkait SOP Pengajuan SPM	1 Laporan	Kabag TU Umum
11.1	Perencanaan anggaran yang tidak realistis atau tidak sesuai dengan kebutuhan program	6	31	Jumlah kegiatan yang tidak terlaksana	1	Prv 11.1	Melakukan analisis kebutuhan yang mendalam sebelum menyusun anggaran	Jumlah dokumen analisa kebutuhan yang diidentifikasi sebelum melakukan penyusunan anggaran	1 Dokumen	Ka Kanwil
11.2	Perubahan kebijakan atau prioritas yang memengaruhi alokasi anggaran	6	32	Jumlah kegiatan yang tidak terlaksana	1	Prv 11.2	Berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengantisipasi perubahan kebijakan	Jumlah kegiatan kordinasi dengan pemerintah pusat terkait adanya perubahan kebijakan	4 Laporan	Ka Kanwil
17.1	Standar waktu proses yang telah ditetapkan (seperti waktu pemeriksaan substantif atau penerbitan sertifikat) mungkin tidak dapat dipenuhi karena lonjakan permohonan	6	33	Jumlah proses pendaftaran kekayaan intelektual yang tidak selesai sesuai standar proses	3	Prv 17.1	Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran merek dagang	Jumlah sosialisasi terkait pentingnya pendaftaran merek dagang kepada masyarakat	1 dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
19.1	Kurangnya pengawasan terhadap dokumen yang diajukan	6	34	Jumlah proses penyelesaian pengaduan yang dimanipulasi	3	Prv 19.1	Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan pemerintah daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyelesaian pengaduan	4 Kegiatan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
20.1	Kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan	6	35	Jumlah ketidakakuratan laporan keuangan terkait pelaporan PNPB AHU	3	Prv 20.1	Menerapkan sistem reward and punishment untuk mendorong integritas	Jumlah kegiatan pelatihan pelaporan keuangan dalam pengelolaan PNPB AHU	2 Laporan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
21.1	Kurangnya alokasi anggaran khusus untuk penanganan pengaduan	6	36	Jumlah kurangnya biaya yang dibutuhkan untuk proses pengaduan masyarakat	3	Prv 21.1	Melakukan analisis kebutuhan yang mendalam sebelum menyusun anggaran	Jumlah kebutuhan yang di analisa sebelum melakukan penyusunan anggaran	3 Dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum

22.1	Kekayaan Intelektual yang disebabkan oleh ketidaktahan masyarakat	6	37	Jumlah biaya tambahan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	3	Prv 22.1	Menyederhanakan proses birokrasi untuk mempercepat pencairan dana	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan pada masyarakat untuk menekan tingginya presentase pelanggaran KI	2 Kegiatan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
24.1	tidak mencukupi untuk menangani peningkatan permohonan	6	38	Jumlah proses permohonan KI yang belum diselesaikan	3	Prv 24.1	Menambah staf tambahan dan meningkatkan kapasitas sistem	Jumlah staff yang ditambah untuk membantu menyelesaikan permohonan KI dan meningkatkan kapasitas sistem	1 Dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
32.1	Kurangnya koordinasi antara Kanwil Kemenkum dengan pemerintahan daerah atau des	6	39	Jumlah program peningkatan sadar hukum di desa binaan yang tidak memenuhi target	3	Prv 32.1	Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan pemerintah daerah	Jumlah rapat koordinasi rutin dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan desa binaan sadar hukum	6 Kegiatan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
34.1	Kanwil dengan pihak eksternal (pemerintah daerah) untuk menguntungkan kepentingan tertentu dalam proses	6	40	Jumlah kolusi dengan Pihak Eksternal	1	Prv 34.1	Mengimplementasikan sistem pengawasan yang ketat	Jumlah sistem pengawasan yang telah diterapkan untuk menekan kemungkinan terjadinya praktik kolusi	2 Laporan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
35.1	Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.	6	41	Jumlah pengalihan dana untuk keperluan pribadi atau kegiatan lain	1	Prv 35.1	Mempublikasikan laporan keuangan secara berkala	Jumlah laporan keuangan yang telah dipublikasikan ke publik	1 Laporan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
36.1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	6	42	Jumlah dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses evaluasi untuk mempermudah pengesahan produk hukum	3	Prv 36.1	Menerapkan sistem reward and punishment untuk mendorong integritas	Jumlah pegawai pelayanan yang telah diberikan reward and punishment dalam upaya mempermudah pengesahan produk hukum	11 Pegawai	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
37.1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	6	43	Jumlah dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses fasilitasi untuk mempermudah pengesahan peraturan daerah	3	Prv 37.1	Menerapkan sistem reward and punishment untuk mendorong integritas	Jumlah pegawai pelayanan yang telah diberikan reward and punishment dalam upaya mempermudah pengesahan peraturan daerah	12 Pegawai	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
42.1	Lemahnya sistem pengawasan internal	6	44	Jumlah penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas	3	Prv 42.1	Melakukan audit internal secara berkala	Jumlah audit yang dilakukan secara berkala	1 Kegiatan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
43.1	Risiko pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien dalam kegiatan fasilitasi rancangan produk hukum,	6	45	Jumlah Anggaran yang Tidak Efisien	1	Prv 43.1	Memberikan pelatihan khusus tentang pengelolaan anggaran	Jumlah pelatihan terkait pengelolaan penganggaran	2 Kegiatan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
44.1	Kurangnya kapasitas staf dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran	6	46	Jumlah penyimpangan atau defisit anggaran	3	Prv 44.1	Memberikan pelatihan khusus tentang pengelolaan keuangan	Jumlah pelatihan terkait pengelolaan keuangan	2 Kegiatan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
45.1	Proses administrasi keuangan yang rumit dan lambat.	6	47	Jumlah penyimpangan atau defisit	1	Prv 45.1	Menyederhanakan proses administrasi keuangan	Jumlah proses administrasi keuangan yang ditangani secara cepat	2 Laporan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum


 Logikarta, 30 Januari 2025
 Kepala Kantor Wilayah,
 Reng Rektimo Seto

Langkah 6: Pemantauan dan Reviu

Unit Pemilik Risiko:
Periode Penerapan:Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
2025

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Risiko yang terjadi (risk exposure)	Risiko terjadi - Toleransi Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan (eksekusi)	KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target	Realisasi	Kinerja Pengendalian Risiko	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28.1	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam memberikan fasilitas perencanaan peraturan daerah	16	Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah tidak selesai tepat waktu, menyebabkan penundaan dalam penyusunan atau pengesahan peraturan daerah	5			28.1 Melakukan penderbinaan proses yang rumit untuk mengurangi beban kerja SDM dengan memanfaatkan Aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM	Jumlah pemanfaatan aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM dalam menjalankan tugas dan persentase keberhasilan tingkat adopsi aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 dokumen				Dilakukan pada setiap periode bulan
5.1	Rendahnya integritas petugas pelayanan	15	Jumlah penerimaan gratifikasi dalam memberikan pelayanan	3			5.1 Semua petugas memahami dan menandatangani komitmen terhadap kode etik dan pakta integritas	Jumlah petugas yang telah menandatangani komitmen terhadap kode etik dan pakta integritas	Ka Karwil	1 Laporan				Dilakukan pada periode B03
14.1	Efisiensi anggaran yang harus menerapkan sistem WFH/WFO	15	Jumlah penanganan yang kurang optimal, terkait dengan waktu yang diperlukan untuk menanggapi pengaduan masyarakat terkait layanan AHU	3			14.1 Menggunakan fitur Live pada aplikasi Instagram dan TikTok untuk masyarakat yang ingin bertanya secara online dan media whatsapp sebagai layanan secara elektronik	Jumlah pelayanan online dan frekuensi live setiap sesi	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	12 Laporan				Dilakukan setiap minggu 1 kali pada hari / jam kerja
15.1	Penyelesaian laporan pengaduan terkait notaris yang tidak tuntas atau tidak memenuhi standar prosedur yang berlaku.	15	Jumlah penanganan yang kurang optimal, terkait dengan waktu yang diperlukan untuk menanggapi pengaduan masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris	3			15.1 Monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses penanganan pengaduan notaris untuk memastikan perbaikan yang dilakukan efektif dengan memanfaatkan aplikasi SIEMON	Jumlah pengaduan yang dipantau secara berkala dan diselesaikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) melalui Aplikasi SIEMON	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	12 Laporan				Dilakukan pada setiap periode bulan
18.1	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur mekanisme dan prosedur terkait layanan AHU	15	Jumlah pungutan liar atau biaya tambahan yang tidak resmi yang diminta dari masyarakat atau pelaku usaha	3			18.1 Menyediakan panduan layanan di loket layanan, website, atau media sosial	Jumlah unit layanan yang menyediakan panduan layanan secara lengkap di loket layanan/website/ atau media sosial	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	1 Dokumen				Dilakukan pada setiap hari pada jam kerja
30.1	Pemohonan bantuan hukum litigasi yang melebihi kapasitas layanan	15	Jumlah bantuan hukum litigasi kepada pemohon yang terlambat	3			30.1 Memperluas kolaborasi dengan lembaga lain seperti LBH atau perguruan tinggi untuk berbagi beban kasus	Jumlah perjanjian kerja sama (MoU) atau kegiatan kolaborasi yang terjalin dengan lembaga bantuan hukum (LBH) atau perguruan tinggi dalam satu tahun	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 Kegiatan				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
31.1	Pemohonan bantuan hukum non litigasi yang melebihi kapasitas layanan	15	Jumlah bantuan hukum non litigasi kepada pemohon yang terlambat	3			31.1 Memperluas kolaborasi dengan lembaga lain seperti LBH atau perguruan tinggi untuk berbagi beban kasus	Jumlah perjanjian kerja sama (MoU) atau kegiatan kolaborasi yang terjalin dengan lembaga bantuan hukum (LBH) atau perguruan tinggi dalam satu tahun	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 Kegiatan				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B11
33.1	Kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi petugas pelayanan	15	Jumlah pelayanan yang buruk atau tidak memuaskan	3			33.1 Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja petugas untuk mengidentifikasi apakah pelatihan telah berdampak positif	Jumlah kegiatan pelaksanaan evaluasi berkala terhadap peningkatan kinerja petugas pasca-pelatihan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Kegiatan				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B12
3.1	Keterbatasan bandwidth dari pusdatin	12	Jumlah gangguan jaringan yang sering terjadi	5			3.1 Melakukan koordinasi rutin dengan Pusdatin untuk memastikan ketersediaan dan keandalan bandwidth	Jumlah kegiatan koordinasi rutin dengan Pusdatin untuk memastikan ketersediaan dan keandalan bandwidth	Ka Karwil	1 Laporan				Dilakukan 1 kali dalam 1 tahun
10.1	Petugas lalai mencatat BMN yang dikuasai pegawai, atau salah input data.	12	Jumlah BMN yang hilang	5			10.1 Melakukan pengawasan dan monitoring secara real-time dengan memanfaatkan penerapan teknologi aplikasi TEBAS BMN	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengawasan dan monitoring real-time melalui aplikasi TEBAS BMN terhadap total aset yang diawasi	Kabag TU Umum	4 laporan				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
25.1	Risiko keterlambatan dalam penyusunan, review, atau pengesahan rancangan produk hukum di daerah karena beban kerja yang tinggi, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, atau koordinasi yang kurang efektif antara Karwil dan pemerintah daerah	12	Jumlah keterlambatan Penyelesaian Produk Hukum	3			25.1 Memanfaatkan teknologi aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM untuk membantu proses review dan analisis dokumen hukum	Jumlah rancangan produk hukum pemerintah daerah yang telah mendapatkan pendampingan hukum dan dinyatakan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Dokumen				dilakukan pada Periode B09
12.1	Keterbatasan SDM atau infrastruktur pendukung	10	Jumlah pelayanan publik AHU kepada masyarakat yang terlambat	1			12.1 Memberikan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan dalam satu tahun untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengendalian risiko	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	1 dokumen				dilakukan pada Periode B06
29.1	Kurangnya tenaga ahli atau staf yang kompeten dalam pengelolaan sistem informasi hukum	10	Jumlah layanan dengan standar yang ditetapkan oleh JDJHN yang tidak sesuai hukum	1			29.1 Menyenggarakan pelatihan khusus untuk staf dalam pengelolaan sistem informasi hukum	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan dalam pengelolaan sistem informasi hukum	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Laporan				dilakukan pada Periode B06
38.1	Kurangnya sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan anggaran	10	Jumlah penyalahgunaan anggaran JDJHN untuk kepentingan pribadi atau kelompok	1			38.1 Melakukan audit internal dan eksternal secara berkala	Jumlah audit internal dan eksternal yang dilakukan secara berkala dalam satu tahun untuk memastikan efektivitas anggaran JDJHN untuk kepentingan pribadi atau kelompok	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Laporan				dilakukan pada Periode B12
39.1	Belum berjalannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum	1			39.1 Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada pelayanan pengaduan serta melakukan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan	Jumlah kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 laporan				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
40.1	Belum berjalannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum	1			40.1 Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada pelayanan pengaduan serta melakukan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan	Jumlah kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 laporan				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
41.1	Tidak adanya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam pelaksanaan program	1			41.1 Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada pelayanan pengaduan serta melakukan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan	Jumlah kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 laporan				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
1.1	Sistem keamanan yang kurang memadai	9	Jumlah kejadian upaya peretasan aplikasi, media sosial	3			1.1 Memperbarui sistem keamanan IT, termasuk firewall dan enkripsi data	Persentase keberhasilan penggunaan sistem keamanan Firewall dan enkripsi data	Ka Karwil	90%				dilakukan pada Periode B12
1.2	Terjadinya kelainan pegawai pemegang akun media sosial karwil	9	Jumlah kejadian upaya peretasan aplikasi, media sosial	3			1.2 Menyusun SOP yang jelas untuk pengelolaan akun media sosial	Jumlah SOP untuk pengelolaan akun media sosial	Ka Karwil	1 Dokumen				dilakukan pada Periode B03
7.1	Kurangnya pengawasan dalam penyerapan anggaran	9	Jumlah penyalahgunaan anggaran dengan penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau di luar tujuan program	3			7.1 Mewajibkan pelaporan berkala tentang penyerapan anggaran	Jumlah pelaporan tentang penyerapan anggaran	Ka Karwil	4 Laporan				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
7.2	Pengelolaan anggaran yang tidak transparan	9	Jumlah penyalahgunaan anggaran dengan penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau di luar tujuan program	3			7.2 Mengimplementasikan sistem terbuka untuk pengelolaan anggaran	Jumlah dokumen pengelolaan anggaran	Ka Karwil	4 Dokumen				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
2.1	Keterbatasan kapasitas penyimpanan server	8	Jumlah penyimpanan data pada server lokal yang tidak terbackup	5			2.1 Menerapkan manajemen data yang efektif untuk mengoptimalkan penyimpanan	Jumlah penyimpanan data yang telah di backup	Ka Karwil	2 Dokumen				dilakukan pada B09 dan B12
13.1	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait kriteria Kekayaan Intelektual	8	Jumlah masyarakat yang belum mendaftarkan produknya pada kekayaan intelektual	5			13.1 Melakukan kampanye sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya Kekayaan Intelektual (KI)	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait pentingnya Kekayaan Intelektual kepada Masyarakat	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	4 Kegiatan				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
16.1	Informasi Kekayaan Intelektual belum menjangkau tempat/wilayah yang berpotensi menghasilkan produk Kekayaan Intelektual	8	Jumlah masyarakat yang belum mendaftarkan produknya pada kekayaan intelektual	5			16.1 Mengadakan roadshow dan workshop di daerah-daerah potensial	Jumlah kegiatan workshop dan roadshow ke daerah yang potensial dan minim pendaftaran KI	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	4 Laporan				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
23.1	Penanganan kasus pelanggaran KI yang tidak efektif	8	Jumlah pelanggaran KI	5			23.1 Memberikan pelatihan khusus untuk penanganan kasus KI	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan untuk penanganan kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Kegiatan				dilakukan pada B06 dan B 09
27.1	Beban kerja yang tinggi atau antrian produk hukum yang harus dievaluasi.	8	Jumlah produk hukum yang dihasilkan mengandung kelemahan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	1			27.1 Menyebarkan distribusi tugas antar tim	Jumlah produk hukum yang telah dievaluasi karena ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Laporan				Dilakukan 1 kali dalam satu periode
4.1	Jumlah SDM di bidang kehumasan tidak memadai	6	Jumlah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)	1			4.1 Merekrut staf tambahan untuk bidang kehumasan	Jumlah tambahan staf di bidang kehumasan	Ka Karwil	1 Dokumen				Dilakukan 1 kali dalam satu periode
6.1	Kurangnya verifikasi dan validasi data	6	Jumlah data dan laporan yang dilakukan manipulasi	3			6.1 Mengimplementasikan sistem verifikasi dan validasi data yang ketat	Jumlah data pelaporan yang tervalidasi dan tidak terdapat unsur manipulasi	Ka Karwil	1 Dokumen				Dilakukan 1 kali dalam satu periode
8.1	Kualifikasi penyedia tidak memenuhi syarat dan Calon Penyedia tidak hadir dalam undangan Klarifikasi administrasi dan Teknis	6	Jumlah Tender pengadaan Barang dan Jasa yang gagal	2			8.1 Melakukan verifikasi ketat terhadap kualifikasi penyedia	Jumlah tender pengadaan barang dan jasa dari penyedia yang telah tervalifikasi kualitasnya	Kabag TU Umum	1 Dokumen				Dilakukan 1 kali dalam satu periode

9.1	Kendala pengujian SPM anatara lain human eror, indikasi fraud, dan lamanya data dukung dari pihak pengelola dan pihak ketiga	6	Jumlah anggaran yang tidak terserap	1			9.1	Memberikan pelatihan tentang prosedur pengujian SPM	Jumlah pelatihan terkait SOP Pengujian SPM	Kabag TU Umum	1 Laporan		pelaksanaan tentative satu periode
11.1	Perencanaan anggaran yang tidak realistis atau tidak sesuai dengan kebutuhan program	6	Jumlah kegiatan yang tidak terlaksana	1			11.1	Melakukan analisis kebutuhan yang mendalam sebelum menyusun anggaran	Jumlah dokumen analisa kebutuhan yang diidentifikasi sebelum melakukan penyusunan anggaran	Ka Karwil	1 Dokumen		Dilakukan pada periode B09
11.2	Perubahan kebijakan atau prioritas yang memengaruhi alokasi anggaran	6	Jumlah kegiatan yang tidak terlaksana	1			11.2	Berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengantisipasi perubahan kebijakan	Jumlah kegiatan kordinasi dengan pemerintah pusat terkait adanya perubahan kebijakan	Ka Karwil	4 Laporan		Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
17.1	Standar waktu proses yang telah ditetapkan (seperti waktu pemeriksaan substantif atau penerbitan sertifikat) mungkin tidak dapat dipenuhi karena lonjakan permohonan	6	Jumlah proses pendaftaran kekayaan intelektual yang tidak selesai sesuai standar proses	3			17.1	Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran merek dagang	Jumlah sosialisasi terkait pentingnya pendaftaran merek dagang kepada masyarakat	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	1 dokumen		
19.1	Kurangnya pengawasan terhadap dokumen yang diajukan	6	Jumlah proses penyelesaian pengaduan yang dimanipulasi	3			19.1	Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan pemerintah daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyelesaian pengaduan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	4 Kegiatan		Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
20.1	Kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan	6	Jumlah ketidakakuratan laporan keuangan terkait pelaporan PNBGP AHU	3			20.1	Menerapkan sistem reward and punishment untuk mendorong integritas	Jumlah kegiatan pelatihan pelaporan keuangan dalam pengelolaan PNBGP AHU	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Laporan		dilakukan pada B06 dan B 09
21.1	Kurangnya alokasi anggaran khusus untuk penanganan pengaduan	6	Jumlah kurangnya biaya yang dibutuhkan untuk proses pengaduan masyarakat	3			21.1	Melakukan analisis kebutuhan yang mendalam sebelum menyusun anggaran	Jumlah kebutuhan yang di analisa sebelum melakukan penyusunan anggaran	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	3 Dokumen		Dilakukan pada periode B06 s.d B12
22.1	Tingginya angka pelanggaran Kekayaan Intelektual yang disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat	6	Jumlah biaya tambahan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	3			22.1	Menyederhanakan proses birokrasi untuk mempercepat pencairan dana	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan pada masyarakat untuk menekan tingginya presentase pelanggaran KI	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Kegiatan		dilakukan pada B06 dan B 09
24.1	Kapasitas staf dan sistem yang tidak mencukupi untuk menangani peningkatan permohonan	6	Jumlah proses permohonan KI yang belum diselesaikan	3			24.1	Menambah staf tambahan dan meningkatkan kapasitas sistem	Jumlah staff yang ditambah untuk membantu menyelesaikan permohonan KI dan meningkatkan kapasitas sistem	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	1 Dokumen		dilakukan 1 kali periode dalam setahun
32.1	Kurangnya koordinasi antara Karwil Kemenkum dengan pemerintahan daerah atau desa	6	Jumlah program peningkatan sadar hukum di desa binaan yang tidak memenuhi target	3			32.1	Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan pemerintah daerah	Jumlah rapat koordinasi rutin dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan desa binaan sadar hukum	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	6 Kegiatan		Dilakukan tiap 2 bulan sekali
34.1	Risiko kolusi antara pejabat Karwil dengan pihak eksternal (pemerintah daerah) untuk menguntungkan kepentingan tertentu dalam proses penyusunan produk hukum.	6	Jumlah kolusi dengan Pihak Eksternal	1			34.1	Mengimplementasikan sistem pengawasan yang ketat	Jumlah sistem pengawasan yang telah diterapkan untuk menekan kemungkinan terjadinya praktik kolusi	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	2 Laporan		Dilakukan pada B03 dan B12
35.1	Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.	6	Jumlah pengalihan dana untuk keperluan pribadi atau kegiatan lain	1			35.1	Mempublikasikan laporan keuangan secara berkala	Jumlah laporan keuangan yang telah dipublikasikan ke publik	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Laporan		Dilakukan pada Periode B12
36.1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	6	Jumlah dokumen palisu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses evaluasi untuk mempermudah pengesahan produk hukum	3			36.1	Menerapkan sistem reward and punishment untuk mendorong integritas	Jumlah pegawai pelayanan yang telah diberikan reward and punishment dalam upaya mempermudah pengesahan produk hukum	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	12 Pegawai		Dilakukan setiap periode bulan berjalan
37.1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	6	Jumlah dokumen palisu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses fasilitasi untuk mempermudah pengesahan peraturan daerah	3			37.1	Menerapkan sistem reward and punishment untuk mendorong integritas	Jumlah pegawai pelayanan yang telah diberikan reward and punishment dalam upaya mempermudah pengesahan peraturan daerah	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	12 Pegawai		Dilakukan setiap periode bulan berjalan
42.1	Lemahnya sistem pengawasan internal	6	Jumlah penyalahgunaan wewenang oleh oknum pelugas	3			42.1	Melakukan audit internal secara berkala	Jumlah audit yang dilakukan secara berkala	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Kegiatan		Dilakukan pada Periode B12
43.1	Risiko pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien dalam kegiatan fasilitasi rancangan produk hukum, seperti pemborosan atau alokasi dana yang tidak tepat sasaran.	6	Jumlah Anggaran yang Tidak Efisien	1			43.1	Memberikan pelatihan khusus tentang pengelolaan anggaran	Jumlah pelatihan terkait pengelolaan anggaran	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	2 Kegiatan		Dilakukan pada setiap semester
44.1	Kurangnya kapasitas staf dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran	6	Jumlah penyimpanan atau defisit anggaran	3			44.1	Memberikan pelatihan khusus tentang pengelolaan keuangan	Jumlah pelatihan terkait pengelolaan keuangan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	2 Kegiatan		Dilakukan pada setiap semester
45.1	Proses administrasi keuangan yang rumit dan lambat.	6	Jumlah penyimpanan atau defisit	1			45.1	Menyederhanakan proses administrasi keuangan	Jumlah proses administrasi keuangan yang ditangani secara cepat	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	2 Laporan		Dilakukan pada periode bersangkutan

CATATAN:
Kolom (1): Disi dengan kode unt potensi penyebab Risiko;
Kolom (2): Disi dengan potensi penyebab Risiko yang diambil dari hasil Tahap II Pedoman Penetapan Konteks Risiko. Potensi
Kolom (3): Disi dengan tingkat dan profil Risiko berdasarkan langkah 2.1. Tahap II Pedoman Penilaian Risiko;
Kolom (4): Disi dengan indikator Risiko utama yang merupakan ukuran terjadinya Risiko berdasarkan langkah 2.1. Tahap II
Kolom (5): Disi dengan toleransi Risiko, berdasarkan langkah 2.1 Tahap II Pedoman Penilaian Risiko;
Kolom (6): Disi dengan Risiko yang terjadi;
Kolom (7): Disi dengan perhitungan antara (Risiko Terjadi – Toleransi Risiko);

 Yogyakarta, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah,
Wang Ruktono Seto

Matrik Pemantauan dan Revu Resiko

<div> <div>Unit Pemilik Risiko:</div> <div>Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta</div> <div>Periode Penerapan:</div> <div>Triwulan I tahun 2025</div> </div>															
Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Risiko yang terjadi (risk exposure)	Risiko terjadi - Toleransi Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan (eksekusi)		KCU Indikator Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target	Realisasi	Knerja Pengendalian	Keterangan	Link Data Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28.1	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam memberikan fasilitas perencanaan peraturan daerah	16	Jumlah fasilitas peraturan daerah tidak	5	5	0	28.1	Melakukan penyederhanaan proses yang rumit untuk mengurangi beban kerja SDM dengan memanfaatkan Aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM	Jumlah pemanfaatan aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM dalam menjalankan tugas dan penastase keberhasilan tingkat adopsi aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 dokumen	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada setiap periode bulan	https://drive.google.com/drive/folders/1haU3a2E7F8Wb12_1cU8jHlBs3jGAK0K?usp=sharing
5.1	Rendahnya integritas petugas pelayanan pemerintahan	15	Jumlah pelanggaran disiplin	3	0	-3	5.1	Semua petugas memahami dan menandatangani komitmen terhadap kode etik dan patra integritas	Jumlah petugas yang telah menandatangani komitmen terhadap kode etik dan patra integritas	Ka Karwil	1 Laporan	Telah dilaksanakan	100%	Dilakukan pada periode B03	https://drive.google.com/drive/folders/129uGueC7q2uad0ufSoda_3sk
14.1	Efisiensi anggaran yang harus menerapkan sistem WFH/WFO	15	Jumlah penangnanan	3	3	0	14.1	Menggunakan fitur Live pada aplikasi Instagram dan TikTok untuk masyarakat yang ingin bertanya	Jumlah pelayanan online dan frekuensi live setiap sesi	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	12 Laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan setiap minggu 1 kali pada hari / jam	https://drive.google.com/file/d/16bV9_2ubZ3GDvMTVtZUacGC2m
15.1	Penyelesaian laporan pengaduan terkait notaris yang tidak tuntas atau tidak memenuhi standar prosedur yang	15	Jumlah penanganan yang kurang	3	0	-3	15.1	Monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses penanganan pengaduan notaris untuk memastikan penanganan yang dilakukan efektif dengan	Jumlah pengaduan yang dipantau secara berkala dan diselesaikan dengan standar operasional prosedur (SOP) melalui Aplikasi SIEMON	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	12 Laporan	Sedang dilaksanakan	100%	Dilakukan pada setiap periode bulan	https://drive.google.com/file/d/1mC3VagacCavellBdPQJ48pua8L3vay?usp=sharing
18.1	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur mekanisme dan prosedur terkait layanan	15	Jumlah pungutan liar atau biaya tambahan yang	3	0	-3	18.1	Menyediakan panduan layanan di loket layanan, website, atau media sosial.	Jumlah unit layanan yang menyediakan panduan layanan secara lengkap di loket layanan/website/ atau media sosial	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	1 Dokumen	Telah dilaksanakan	100%	Dilakukan pada setiap hari pada jam kerja	https://drive.google.com/drive/folders/1w83AE3HtHLL8VtPM-XwNcYTDzG6?usp=sharing
30.1	Pemohonan bantuan hukum litigasi yang melebihi kapasitas layanan	15	Jumlah bantuan hukum litigasi kepada pemohon	3	0	-3	30.1	Memperluas kolaborasi dengan lembaga lain seperti LBH atau perguruan tinggi untuk berbagi beban kasus	Jumlah perjanjian kerja sama (MoU) atau kegiatan kolaborasi yang terjalin dengan lembaga bantuan hukum (LBH) atau perguruan tinggi dalam satu tahun	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	
31.1	Pemohonan bantuan hukum non litigasi yang melebihi kapasitas layanan	15	Jumlah bantuan hukum non	3	0	-3	31.1	Memperluas kolaborasi dengan lembaga lain seperti LBH atau perguruan tinggi untuk berbagi beban kasus	Jumlah perjanjian kerja sama (MoU) atau kegiatan kolaborasi yang terjalin dengan lembaga bantuan hukum (LBH) atau perguruan tinggi dalam satu tahun	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B11	
33.1	Kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi petugas pelayanan	15	Jumlah pelayanan yang	3	0	-3	33.1	Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja petugas untuk mengidentifikasi apakah pelatihan	Jumlah kegiatan pelaksanaan evaluasi berkala terhadap peningkatan kinerja petugas pasca- pelatihan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B12	https://drive.google.com/drive/folders/1eX2YwXNL7Dh
3.1	Keterbatasan bandwidth dari pusdatin	12	Jumlah gangguan jaringan yang	5	5	0	3.1	Melakukan koordinasi rutin dengan Pusdatin untuk memastikan ketersediaan dan keandalan bandwidth	Jumlah kegiatan koordinasi rutin dengan Pusdatin untuk memastikan ketersediaan dan keandalan bandwidth	Ka Karwil	1 Laporan	Telah dilaksanakan	100%	Dilakukan 1 kali dalam 1 tahun	
10.1	Petugas lalai mencatat BMN yang dikuasai pegawai, atau salah input data	12	Jumlah BMN yang hilang	5	0	-5	10.1	Melakukan pengawasan dan monitoring secara real time dengan aplikasi TERAS BMN terhadap total aset yang	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengawasan dan monitoring real time dengan aplikasi TERAS BMN terhadap total aset yang	Kabag TU Umum	4 laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1eX2YwXNL7Dh
25.1	Risiko keterlambatan dalam penyusunan, review, atau pengesahan rancangan produk hukum di daerah karena beban kerja yang tinggi, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, atau koordinasi yang kurang efektif antara Karwil dan pemerintah daerah	12	Jumlah keterlambatan	3	3	0	25.1	Memfaktakan teknologi aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM untuk membantu proses review dan analisis dokumen hukum	Jumlah rancangan produk hukum pemerintah daerah yang telah mendapatkan pendampingan hukum dan dinyatakan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Dokumen	Sedang dilaksanakan	25%	dilakukan pada Periode B09	
12.1	Keterbatasan SDM atau infrastruktur pendukung	10	Jumlah pelayanan publik	1	1	0	12.1	Memberikan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan dalam satu tahun untuk meningkatkan kompetensi pegawai	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	1 dokumen	Sedang dilaksanakan	75%	dilakukan pada Periode B06	https://drive.google.com/drive/folders/1eX2YwXNL7Dh
29.1	Kurangnya tenaga ahli atau staf yang kompeten dalam pengelolaan sistem informasi	10	Jumlah layanan dan	1	1	0	29.1	Menyenggarakan pelatihan khusus untuk staf dalam pengelolaan sistem informasi hukum	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan dalam pengelolaan sistem informasi hukum	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Laporan	Sedang dilaksanakan	75%	dilakukan pada Periode B06	
38.1	Kurangnya sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan	10	Jumlah penyalahgunaan	1	0	-1	38.1	Melakukan audit internal dan eksternal secara berkala	Jumlah audit internal dan eksternal yang dilakukan secara berkala dalam satu tahun untuk memastikan efektivitas	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Laporan	Sedang dilaksanakan	25%	dilakukan pada Periode B12	
39.1	Belum berjalannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	Jumlah pungutan liar atau praktik	1	0	-1	39.1	Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada pelayanan pengadilan serta melakukan	Jumlah kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan yang	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1WTPNIAvJ0U1vdfBf6d_4M0
40.1	Belum berjalannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	Jumlah pungutan liar atau praktik	1	0	-1	40.1	Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada pelayanan pengadilan serta melakukan	Jumlah kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan yang	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1WTPNIAvJ0U1vdfBf6d_4M0
41.1	Tidak adanya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	Jumlah pungutan liar atau praktik	1	0	-1	41.1	Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada pelayanan pengadilan serta melakukan	Jumlah kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan yang	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1WTPNIAvJ0U1vdfBf6d_4M0
1.1	Sistem keamanan yang kurang memadai	9	Jumlah kejadian	3	0	-3	1.1	Memperbarui sistem keamanan IT, termasuk firewall	Presentase keberhasilan penggunaan sistem keamanan	Ka Karwil	90%	Sedang dilaksanakan	25%	dilakukan pada Periode B12	https://drive.google.com/drive/folders/1eX2YwXNL7Dh
1.2	Terjadinya kelainan pegawai pemegang akun media sosial karwil	9	Jumlah kejadian	3	0	-3	1.2	Menyusun SOP untuk pengelolaan akun media sosial	Jumlah SOP untuk pengelolaan akun media sosial	Ka Karwil	1 Dokumen	Sedang dilaksanakan	50%	dilakukan pada Periode B03	https://drive.google.com/drive/folders/1eX2YwXNL7Dh
7.1	Kurangnya pengesahan dan penyeseran anggaran	9	Jumlah penyalahgunaan	3	0	-3	7.1	Mewajibkan pelaporan berkala tentang penyerapan anggaran	Jumlah pelaporan tentang penyerapan anggaran	Ka Karwil	4 Laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1eX2YwXNL7Dh
7.2	Pengelolaan anggaran yang tidak	9	Jumlah	3	0	-3	7.2	Mengimplementasikan sistem terbuka untuk	Jumlah dokumen pengelolaan anggaran	Ka Karwil	4 Dokumen	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode	https://drive.google.com/drive/folders/1eX2YwXNL7Dh
2.1	Keterbatasan kapasitas penyempinan	8	Jumlah	5	5	0	2.1	Menerapkan manajemen data yang telah di backup	Jumlah manajemen data yang telah di backup	Ka Karwil	2 Dokumen	Sedang dilaksanakan	50%	dilakukan pada B09 dan B12	
13.1	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya Kekayaan Intelektual (KI)	8	Jumlah masyarakat yang	5	0	-5	13.1	Melakukan kampanye sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya Kekayaan Intelektual (KI)	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait pentingnya Kekayaan Intelektual kepada Masyarakat	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	4 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	
16.1	Informasi Kekayaan Intelektual belum mengajuku tempat/wilayah yang berpotensi menghasilkan produk	8	Jumlah masyarakat yang belum	5	0	-5	16.1	Mengadakan roadshow dan workshop di daerah-daerah potensial	Jumlah kegiatan workshop dan roadshow ke daerah yang potensial dan minim pendataan KI	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	4 Laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	
23.1	Penanganan kasus pelanggaran KI yang tidak efektif	8	Jumlah pelanggaran KI	5	0	-5	23.1	Memberikan pelatihan khusus untuk penanganan kasus KI	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan untuk penanganan kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	dilakukan pada B06 dan B 09	https://drive.google.com/drive/folders/1eX2YwXNL7Dh
27.1	Beban kerja yang tinggi atau antrian produk hukum yang harus dievaluasi.	8	Jumlah produk hukum yang	1	1	0	27.1	Menyebarkan distribusi tugas antar tim	Jumlah produk hukum yang telah dievaluasi karena ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan 1 kali dalam satu periode	https://drive.google.com/drive/folders/1eX2YwXNL7Dh
4.1	Jumlah SDM di bidang kehumasan tidak memadai	6	Jumlah kekurangan	1	1	0	4.1	Merekrut staf tambahan untuk bidang kehumasan	Jumlah tambahan staf di bidang kehumasan	Ka Karwil	1 Dokumen	Telah dilaksanakan	50%	Dilakukan 1 kali dalam satu periode	https://drive.google.com/drive/folders/1eX2YwXNL7Dh
6.1	Kurangnya verifikasi dan validasi data	6	Jumlah data dari	3	0	-3	6.1	Mengimplementasikan sistem verifikasi dan validasi	Jumlah data pelaporan yang terverifikasi dan tidak terdapat	Ka Karwil	1 Dokumen	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan 1 kali dalam satu periode	https://drive.google.com/drive/folders/1eX2YwXNL7Dh
8.1	Kualifikasi penyedia tidak memenuhi syarat dan Calon Penyedia tidak hadir dalam undangan Klarifikasi administrasi	6	Jumlah Tender pengadaan Barang dan Jasa	2	0	-2	8.1	Melakukan verifikasi ketat terhadap kualifikasi penyedia	Jumlah tender pengadaan barang dan jasa dari penyedia yang telah terverifikasi kualiannya	Kabag TU Umum	1 Dokumen	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan 1 kali dalam satu periode	https://drive.google.com/drive/folders/1eX2YwXNL7Dh
9.1	Kendala pengajuan SPM antara lain human eror, indikasi fraud, dan lainnya data dukung dari pihak pengelola tidak terengkap	6	Jumlah anggaran yang tidak terengkap	1	3	2	9.1	Memberikan pelatihan tentang prosedur pengajuan SPM	Jumlah pelatihan tentang SOP Pengajuan SPM	Kabag TU Umum	1 Laporan	Sedang dilaksanakan	50%	pelaksanaan tentative satu periode	
11.1	Perencanaan anggaran yang tidak realistis atau tidak sesuai dengan	6	Jumlah kegiatan yang tidak	1	3	2	11.1	Melakukan analisis kebutuhan yang mendalam sebelum menyusun anggaran	Jumlah dokumen analisa kebutuhan yang diidentifikasi sebelum melakukan penyusunan anggaran	Ka Karwil	1 Dokumen	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B09	https://drive.google.com/drive/folders/1eX2YwXNL7Dh
11.2	Perubahan kebijakan atau prioritas yang mengganggu alokasi anggaran	6	Jumlah kegiatan yang tidak	1	3	2	11.2	Berkordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengantisipasi perubahan kebijakan	Jumlah kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait adanya perubahan kebijakan	Ka Karwil	4 Laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	
17.1	Standar waktu proses yang telah ditetapkan (seperti waktu pemeriksaan substatif atau pemberian sertifikat) mungkin tidak dapat dipenuhi karena lonjakan permohonan	6	Jumlah proses pendaftaran kekayaan intelektual yang tidak selesai	3	3	0	17.1	Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran merek dagang	Jumlah sosialisasi terkait pentingnya pendaftaran merek dagang kepada masyarakat	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	1 dokumen	Sedang dilaksanakan	75%		
19.1	Kurangnya pengawasan terhadap dokumen yang dijukan	6	Jumlah proses penyelesaian	3	3	0	19.1	Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan pemerintah daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyelesaian pengaduan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	4 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	
20.1	Kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan	6	Jumlah ketidakefektifan	3	3	0	20.1	Menerapkan sistem reward and punishment untuk mendorong integritas	Jumlah kegiatan pemberian penghargaan/penghargaan PNPB AHU	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Laporan	Sedang dilaksanakan	50%	dilakukan pada B06 dan B 09	
21.1	Kurangnya alokasi anggaran khusus untuk penanganan pengaduan	6	Jumlah anggaran biaya	3	3	0	21.1	Melakukan analisis kebutuhan yang mendalam sebelum menyusun anggaran	Jumlah analisis kebutuhan yang mendalam sebelum menyusun anggaran	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	3 Dokumen	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B06 dan B12	
22.1	Terangnya angka pelanggaran Kekayaan Intelektual yang disebabkan oleh ketidaktahan masyarakat	6	Jumlah biaya tambahan untuk melakukan	3	3	0	22.1	Menyederhanakan proses birokrasi untuk mempermudah pencarian dana	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan pada masyarakat untuk menekan tingginya presentase pelanggaran KI	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	dilakukan pada B06 dan B 09	
24.1	Kapasitas staf dan sistem yang tidak mencukupi untuk menangani peningkatan permohonan	6	Jumlah proses permohonan KI yang belum	3	3	0	24.1	Menambah staf tambahan dan meningkatkan kapasitas sistem	Jumlah staf yang ditambah untuk membantu menyelesaikan permohonan KI dan meningkatkan kapasitas sistem	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	1 Dokumen	Sedang dilaksanakan	50%	dilakukan 1 kali periode dalam setahun	https://drive.google.com/drive/folders/1eX2YwXNL7Dh
32.1	Kurangnya koordinasi antara Karwil Kementerian dengan pemerintahan daerah atau des	6	Jumlah program peningkatan	3	3	0	32.1	Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan pemerintah daerah	Jumlah rapat koordinasi rutin dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan desa binaan sadar hukum	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	6 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan tiap 2 bulan sekali	https://drive.google.com/drive/folders/1eX2YwXNL7Dh
34.1	Risiko kolusi antara pejabat Karwil dengan pihak eksternal (pemerintah daerah) untuk menguntungkan kepentingan tertentu dalam proses	6	Jumlah kolusi Eksternal	1	0	-1	34.1	Mengimplementasikan sistem pengawasan yang ketat	Jumlah sistem pengawasan yang telah diterapkan untuk menekan kemungkinan terjadinya praktik kolusi	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	2 Laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada B03 dan B12	https://drive.google.com/drive/folders/1eX2YwXNL7Dh

35,1	Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.	6	Jumlah pengalihan dana untuk keperluan	1	0	-1	35,1	Memublikasikan laporan keuangan secara berkala	Jumlah laporan keuangan yang telah dipublikasikan ke publik	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada Periode B12	https://drive.google.com/drive/folders/1hu006V5HuYgKo_xwnGikpbdVMP7EX3uep-sharimg
36,1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	6	Jumlah dokumen pelaiu atau tidak	3	3	0	36,1	Menerapkan sistem reward and punishment untuk mendorong integritas	Jumlah pegawai pelayanan yang telah diberikan reward and punishment dalam upaya mempermudah pengesahan produk	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	12 Pegawai	Telah dilaksanakan	100%	Dilakukan setiap periode bulan berjalan	https://drive.google.com/drive/folders/1uCGzKS7zxmKChetVemg
37,1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	6	Jumlah dokumen pelaiu atau tidak	3	3	0	37,1	Menerapkan sistem reward and punishment untuk mendorong integritas	Jumlah pegawai pelayanan yang telah diberikan reward and punishment dalam upaya mempermudah pengesahan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	12 Pegawai	Telah dilaksanakan	100%	Dilakukan setiap periode bulan berjalan	https://drive.google.com/drive/folders/1uCGzKS7zxmKChetVemg
42,1	Lemahnya sistem pengawasan internal	6	Jumlah penyalahgunaan wewenang oleh	3	3	0	42,1	Melakukan audit internal secara berkala	Jumlah audit yang dilakukan secara berkala	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada Periode B12	
43,1	Risiko pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien dalam kegiatan fasilitasi rancangan produk hukum, seperti pemborosan atau alokasi dana yang tidak tepat sasaran.	6	Jumlah Anggaran yang Tidak Efisien	1	1	0	43,1	Memberikan pelatihan khusus tentang pengelolaan anggaran	Jumlah pelatihan terkait pengelolaan penganggaran	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	2 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada setiap semester	https://drive.google.com/drive/folders/1Lc0T3M2BzUjJMSUGUqMhokkR9oxK86?usp=sharing
44,1	Kurangnya kapasitas staf dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan	6	Jumlah penyimpangan	3	3	0	44,1	Memberikan pelatihan khusus tentang pengelolaan keuangan	Jumlah pelatihan terkait pengelolaan keuangan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	2 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada setiap semester	https://drive.google.com/drive/folders/1xMBuK25Fzx5HZY7ClnT0
45,1	Proses administrasi keuangan yang rumit dan lambat.	6	Jumlah penyimpangan	1	1	0	45,1	Menyederhanakan proses administrasi keuangan	Jumlah proses administrasi keuangan yang ditangani secara cepat	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan	2 Laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode bersangskutan	